

ABSTRAK

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat. Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan melakukan tindak pidana ialah penggelapan atau penyalahgunaan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 475/Pid.B/2024/Pn.Jmb terhadap tindak pidana penggelapan dana operasional perusahaan CV. Po. Putra Di Pengadilan Negeri Jambi, Apakah vonis yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dana operasional perusahaan CV. Po. Putra Di Pengadilan Negeri Jambi sudah mencerminkan rasa keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Normatif*. Salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*). Berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam Dakwaan Primer melanggar Pasal 374 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 374 KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Putusan majelis hakim yang pada akhirnya hanya menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara terhadap terdakwa dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya pihak korban. menurut penulis, vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa, mengingat terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut dengan niat dan sudah di rencanakan dengan matang setelah itu terdakwa kabur sehingga nilai kerugian yang ditimbulkan oleh korban cukup besar. Saran yang dikemukakan hendaknya hakim memvonis terdakwa lebih berat lagi vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara menurut penulis masih terlalu ringan. Hal ini bertujuan memberikan efek jera kepada terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan yang sama mengingat terdakwa dengan sengaja dan berencana menggelapkan uang perusahaan tersebut setelah itu terdakwa kabur.

Kata Kunci : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis, Tindak Pidana Penggelapan Dana Operasional Perusahaan

ABSTRACT

A criminal act is an act of doing or not doing something that has an element of error as an act that is prohibited and punishable by crime, where the imposition of a crime against the perpetrator is for the sake of maintaining legal order and ensuring security in society. Regarding unlawful acts, one form of committing a criminal act is embezzlement or abuse of office as regulated in Article 374 of the Criminal Code. The issue raised was what was the judge's legal consideration in handing down decision Number: 475/Pid.B/2024/Pn.Jmb regarding the criminal act of embezzling CV company operational funds. Po. Putra At the Jambi District Court, what was the verdict handed down by the judge for the criminal act of embezzling operational funds from the CV company. Po. Putra at the Jambi District Court has reflected a sense of justice. The specification of this research is analytical descriptive research. In writing this thesis the author used the Normative Juridical research type. One of the author's data information as a research object is using secondary documents (Jambi District Court Decision). Based on the consideration of the elements in Article 374 of the Criminal Code, it has been legally proven and it is certain that the defendant has committed a criminal act as alleged by the public prosecutor in the Primary Indictment of violating Article 374 of the Criminal Code and because there is no excuse for acting on the unlawful nature and justifiable reasons for acting on the defendant's wrongdoing, then the defendant must be declared guilty and the defendant must be sentenced to a crime commensurate with his actions, the threat of which under Article 374 of the Criminal Code is punishable by imprisonment. a maximum of 5 (five) years. However, in this case the defendant was sentenced to 1 (one) year in prison and 6 (six) months in prison. The panel of judges' decision, which in the end only sentenced the defendant to 1 (one) year and 6 (six) prison terms, was considered to still not reflect a sense of justice for society, especially the victim. According to the author, the sentence handed down was still too light and not commensurate with the defendant's actions, considering that the defendant carried out the act of embezzlement with intention and had carefully planned it, after which the defendant ran away so that the value of the losses caused by the victim was quite large. The suggestion put forward is that the judge should sentence the defendant more severely, a sentence of 1 (one) year and 6 (six) prison terms, according to the author, is still too light. This aims to provide a deterrent effect on the defendant so that he does not commit the same crime in the future considering that the defendant deliberately and premeditatedly embezzled the company's money after which the defendant ran away.

Keywords: *Analysis of Judges' Considerations in Imposing Sentences, Crime of Embezzlement of Company Operational Funds*